

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan lintas batas negara atau Transnational Organized Crime (TOC) merupakan ancaman global yang terus berkembang dengan kompleksitas yang semakin meningkat, terutama di Asia Tenggara. Selama periode 2021 hingga 2025, modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengalami transformasi signifikan, khususnya dalam bentuk kejahatan siber melalui skema online scam yang semakin marak dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir (Andim et al., 2025). Kamboja sebagai pusat operasi menjadi episentrum kejahatan transnasional ini, menjadikan wilayah tersebut sebagai basis sindikat penipuan internasional yang menjerat ribuan Warga Negara Indonesia (WNI). Sebanyak 110 WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan di Kamboja berhasil diamankan setelah keributan di lokasi perusahaan scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, pada Oktober 2025. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh dan otoritas setempat terus berkoordinasi untuk menjamin keselamatan, pendampingan hukum, dan proses repatriasi yang manusiawi bagi para korban.

Sebagian besar korban direkrut melalui platform digital dengan janji gaji tinggi serta proses mudah, namun kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitasi berat dan ancaman kekerasan (Polri, Divisi Hubungan Internasional, 2025). Data resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menunjukkan peningkatan luar biasa kasus korban TPPO Daring secara tahunan, dari 56 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.310 kasus pada tahun 2024, dan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2025 (Kemlu RI, 2024). Secara kumulatif sepanjang periode 2021 hingga Oktober 2025, Kemlu RI mencatat

total 7.600 kasus WNI terkait scam, dengan Kamboja menjadi negara tertinggi sebesar 4.300 kasus (Kemlu RI, 2025; data per Oktober 2025). Para korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di wilayah yang dikenal sebagai Kota Cina di Sihanoukville, namun sesampainya di sana mereka dihadapkan pada kondisi kerja eksploitatif, termasuk jam kerja berlebihan dan kekerasan fisik di industri penipuan online (Kompas, 2025).

Fenomena ini menandai sisi gelap pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat dan memperluas cakupan kejahatan lintas negara, yang mengkombinasikan aspek kejahatan siber dan perdagangan manusia dalam dimensi kompleks dan multidimensi (Brenner, 2010). Penggunaan enkripsi end-to-end pada aplikasi pesan dan platform dark web menyebabkan pelacakan jejak pelaku digital, sementara korban mengalami trauma psikologis berkepanjangan yang memerlukan rehabilitasi komprehensif. Skala kerugian ekonomi global dari penipuan online diperkirakan mencapai miliaran dolar AS per tahun, dengan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang korban terbesar di kawasan ASEAN.

Pada Februari 2025, Perdana Menteri Kamboja membentuk Komisi Pemberantasan Scam Online untuk meningkatkan koordinasi lintas institusi dan kerja sama internasional. Sejak awal tahun itu, aparat keamanan Kamboja melakukan operasi razia yang menyebabkan penangkapan serta pelepasan ratusan WNI yang terlibat dalam skim scam dare. Pengaduan terkait masalah WNI meningkat drastis hingga 620 kasus pada Februari 2025, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (Polri, Divisi Hubungan Internasional, 2025). Meskipun upaya tersebut menunjukkan komitmen politik, efektivitasnya masih terbatas karena banyak pelaku sindikat utama yang tetap beroperasi di bawah perlindungan korupsi lokal dan kutukan lemah.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) memainkan peran krusial dalam pencegahan rekrutmen ilegal dan repatriasi korban TPPO berbasis online scam di Kamboja, melengkapi upaya Polri melalui diplomasi kepolisian.

BP3MI, di bawah Kementerian P2MI, merancang strategi lintas kementerian sejak 2025 untuk atasi akar masalah perekrutmen via media sosial ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand, dengan kolaborasi Kemlu dan Polri guna edukasi serta blokir agen ilegal.

Data publik menunjukkan eskalasi kasus: Pada Oktober 2025, BP3MI (kini bernomenklatur KP2MI sejak Kabinet Merah Putih 2024, namun dalam penelitian ini tetap disebut BP3MI sesuai nomenklatur aktif saat data dikumpulkan) memastikan 110 WNI. Hambatan struktural seperti perbedaan sistem hukum antarnegara serta kendala prosedural seperti birokrasi dan ketidakefisienan waktu respon menjadi tantangan serius dalam penegakan kerja sama ini (Hasan et al., 2023). Kamboja mendapat sorotan internasional karena dianggap kurang agresif dalam menindak pelaku utama sindikat scam compound, menimbulkan keraguan atas komitmen politik dan efektivitas mekanisme ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, khususnya Trafficking for Forced Labour (ACTIP) (UNODC, 2023). Laporan Trafficking in Persons (TIP) Report dari US Department of State 2024 menempatkan Kamboja pada Tier 3, mengindikasikan upaya pemerintah yang tidak mampu memerangi TPPO meskipun ada kerja sama bilateral yang intens dengan Indonesia.

Pendekatan keamanan manusia yang mengintegrasikan aspek hukum, keamanan siber, serta perlindungan dan pemulangan korban secara terintegrasi sangat diperlukan sebagai fokus utama kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja (Andreas & Nadelmann, 2023). Kerja sama ini tidak hanya menuntut koordinasi antar-aparat penegak hukum, tetapi juga kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan kementerian luar negeri, badan intelijen, dan organisasi masyarakat sipil untuk memutus rantai rekrutmen di hulu serta memastikan keadilan bagi korban di hilir.

Penanganan kasus ini menuntut respons terintegrasi di tingkat bilateral dengan penguatan kerja sama dalam pertukaran intelijen, operasi bersama, serta

perlindungan dan pemulihan korban (Hartono Sulisty, 2024; Sugiyono Runturambi, 2024). Pemerintah Indonesia dan otoritas Kamboja berupaya memastikan keadilan serta keselamatan WNI korban sindikat ini, sekaligus mengembangkan solusi jangka panjang untuk menghambat praktik kejahatan siber transnasional di kawasan ASEAN. Keberhasilan jangka panjang memerlukan harmonisasi regulasi bukti digital lintas batas, peningkatan kapasitas forensik siber, dan pembangunan rezim keamanan bilateral yang berkelanjutan antara aparat kepolisian Indonesia dan Kamboja

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja dalam menanggulangi TPPO berbasis online scam periode 2021–2025 telah berjalan melalui sejumlah mekanisme operasional yang dapat diukur capaiannya. Pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah seberapa efektif mekanisme-mekanisme tersebut bekerja di tengah berbagai keterbatasan struktural dan prosedural yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana efektivitas mekanisme kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja dalam penanggulangan kejahatan siber TPPO berbasis online scam pada periode 2021–2025, dilihat dari dimensi prosedural dan outcome?
- b) Bagaimana proses pembagian intelijen (intelligence sharing) dan pelaksanaan investigasi bersama (joint investigation) antara aparat penegak hukum Indonesia dan Kamboja dalam menanggulangi TPPO berbasis online scam?
- c) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kerja sama bilateral tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya?

Ketiga Pertanyaan penelitian utama berfungsi sebagai payung evaluatif yang mengukur efektivitas secara menyeluruh dari dua dimensi: dimensi prosedural (cara kerja mekanisme) dan dimensi outcome (hasil yang dicapai). Dua pertanyaan operasional kemudian menjabarkannya secara spesifik: pertanyaan a) menelusuri proses konkret pelaksanaan mekanisme prosedural, sedangkan pertanyaan b) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang membatasi efektivitas implementasinya sekaligus menelaah upaya mengatasinya.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini memiliki tiga tujuan yang dirancang secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian utama dan dua pertanyaan operasionalnya:

- Mengevaluasi efektivitas mekanisme kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja dalam penanggulangan TPPO berbasis online scam periode 2021–2025 secara komprehensif, dilihat dari dimensi prosedural (intelligence sharing dan joint investigation) dan dimensi outcome (penyelamatan korban dan penindakan pelaku).
- Mendeskripsikan dan menganalisis proses pembagian intelijen (intelligence sharing) dan pelaksanaan investigasi bersama (joint investigation) antara aparat penegak hukum Indonesia dan Kamboja, termasuk kanal-kanal operasional yang digunakan dan tingkat capaiannya.
- Mengidentifikasi hambatan struktural berupa perbedaan sistem hukum, ketiadaan perjanjian ekstradisi bilateral, dan ketidakselarasan regulasi bukti digital serta hambatan prosedural berupa birokrasi, waktu respons, dan koordinasi antarlembaga yang dihadapi dalam implementasi kerja sama bilateral, serta menelaah upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mengatasinya.

Ketiga tujuan di atas bersama-sama menghasilkan penilaian komprehensif atas efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja serta rekomendasi kebijakan konkret untuk penguatan Tata Kelola Kejahatan Transnasional di kawasan ASEAN.

### **Tujuan Operasional**

- Mengukur efektivitas dimensi prosedural melalui analisis data kasus TPPO 2021-2025, termasuk jumlah information sharing yang berhasil dan operasi bersama yang dilaksanakan.
- Mengidentifikasi kemacetan sistemik dan merumuskan solusi harmonisasi regulasi bukti digital lintas batas.
- Memberikan rekomendasi bagi penguatan mandat Atase Polisi (Atpol), reformulasi Prosedur Operasi Standar (SOP), dan membangun kepercayaan antar aparat penegak hukum.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ganda yang signifikan, yaitu secara teoritis untuk pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian keamanan transnasional, dan praktis untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum serta perlindungan warga negara di tingkat nasional dan bilateral.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- Pengkayaan analisis kerangka Tata Kelola Kejahatan Transnasional (TCG) dan Teori Rezim Internasional melalui studi kasus empiris Indonesia-Kamboja.
- Mendukung program edukasi BP3MI untuk pencegahan perekrutmen ilegal, termasuk kampanye 'Lindungi PMI' dan verifikasi lowongan via aplikasi resmi, yang telah gagalkan ratusan keberangkatan ilegal serta

fasilitasi repatriasi 100+ korban Kamboja 2025." Ini memperkuat rekomendasi kebijakan lintas sektoral, tingkatkan efektivitas regime bilateral Indonesia-Kamboja.

- Pengembangan konsep diplomasi polisi sebagai instrumen keamanan non-tradisional dalam menghadapi kejahatan siber lintas batas.
- Kontribusi metodologi melalui pendekatan proses penelusuran dalam efektivitas rezim keamanan bilateral.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Penelitian ini memberikan kontribusi langsung dan strategi kepada pemangku kepentingan di Indonesia, khususnya lembaga penegak hukum, diplomatik, dan perlindungan warga negara yang berada di garis depan penanganan TPPO berbasis online scam. Manfaat praktis dijelaskan dalam strategi empat area utama:

##### **1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum**

Menghasilkan masukan strategi bagi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) dan Satgas TPPO, serta lembaga terkait untuk merancang mekanisme kerja sama bilateral yang lebih adaptif dan efektif dalam menangani cyber-enabled crimes .

##### **2. Reformulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional**

Mengidentifikasi hambatan dalam pembagian intelijen dan investigasi bersama, lalu menyusun protokol pembagian intelijen waktu nyata dan mekanisme otorisasi jalur cepat untuk mengatasi perbedaan birokrasi dan integritas antara Indonesia dan Kamboja.

##### **3. Penguatan Kapasitas Atase Polisi (Atpol) KBRI Phnom Penh**

Memberikan rekomendasi peningkatan mandat, pelatihan spesifik cyber forensics, dan trust-building dengan Kepolisian Nasional Kamboja (CNP), menjadikan Atpol sebagai jembatan operasional yang efisien tanpa hambatan birokrasi berlapis.

#### 4. Kontribusi Pencegahan dan Penindakan TOC di Tingkat Regional

Menyediakan cetak biru praktik terbaik bagi ASEANAPOL dan negara ASEAN lainnya dalam penanggulangan kejahatan siber transnasional, sekaligus mendukung program edukasi BP3MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk pencegahan perekrutan pekerja ilegal.

##### 1.5. Sistematika Penulisan

Melalui penelitian yang lebih mendalam, kajian ini disusun secara sistematis ke dalam Lima bab yang mengalir secara logis dari penetapan masalah hingga perumusan rekomendasi:

- **BAB I PENDAHULUAN:** (Bab ini) Memuat latar belakang masalah yang diuraikan secara komprehensif, mengidentifikasi urgensi dan kebaruan penelitian, merumuskan masalah, menetapkan tujuan yang terperinci, menjabarkan manfaat (teoritis dan praktis), dan menguraikan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi dan justifikasi filosofis serta praktis penelitian.
- **BAB II KERANGKA TEORI:** Menguraikan tinjauan pustaka yang sistematis untuk menempatkan penelitian di tengah diskusi akademis yang relevan. Selanjutnya, Bab ini mendefinisikan konsep-konsep kunci (seperti TPPO berbasis *Online Scam*, TOC, dan *Police Diplomacy*), dan menetapkan landasan teoretis utama, yaitu Teori Tata Kelola Kejahatan Transnasional (TCG) dan Teori Rezim Internasional, yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur efektivitas *police diplomacy* Polri. Bab ini diakhiri dengan Kerangka Pemikiran yang memvisualisasikan alur logis analisis.

- BAB III METODE PENELITIAN: Menjelaskan pilihan metodologi (pendekatan kualitatif, desain studi kasus), penetapan lokasi dan waktu penelitian (Indonesia-Kamboja, 2021-2025), teknik pengumpulan data utama (wawancara mendalam dan analisis dokumen), teknik analisis data (Analisis Tematik), serta pertimbangan etis untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan.
- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Menyajikan gambaran umum hubungan Indonesia-Kamboja, profil institusional aktor-aktor kunci (Divhubinter Polri, BP3MI, Atpol KBRI Phnom Penh), kondisi objektif kejahatan siber di Kamboja, serta sikap kedua pemerintah. Bab ini kemudian menganalisis temuan empiris dari wawancara dan dokumen berdasarkan tiga rumusan masalah: efektivitas operasional Polri (dilihat dari *intelligence sharing*, *joint investigation*, dan repatriasi) dan identifikasi mendalam terhadap hambatan struktural/prosedural. Pembahasan ini menganalisis temuan dengan mengaitkannya secara kritis pada Teori TCG dan Rezim Internasional.
- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Menyimpulkan temuan utama penelitian secara ringkas, menjawab secara tuntas ketiga rumusan masalah, dan memberikan saran strategis konkret yang ditujukan untuk memperkuat mekanisme kerja sama bilateral Polri-Kamboja dalam menghadapi krisis TPPO berbasis *online scam* di masa mendatang.